

Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kota Surabaya

Izza Mutia Aqila ¹⁾, Nazwa Septiana ²⁾, Muhammad Zuhul Mafazi ³⁾, Alvian Pratista Hananto ⁴⁾, Narizky Nur Fakhry Maulidina ⁵⁾
Tauran ⁶⁾, Wilda Sumarsyah ⁷⁾

^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} Universitas Negeri Surabaya
email: Nazwaseptiana648@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Surabaya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan untuk memperoleh data, kami melakukan wawancara, observasi, dan literature review. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi telah memberikan dampak terhadap pemerataan akses pendidikan dan mengurangi pandangan masyarakat terkait adanya sekolah favorit. Namun, sistem pendaftaran secara online dan kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran menyebabkan banyak masyarakat yang masih kebingungan terkait mekanismenya. Dan juga ditemukan beberapa kendala lain seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan daya tampung sekolah, serta adanya praktik manipulasi data domisili. Maka dari hasil evaluasi, kebijakan sistem zonasi dinilai belum sepenuhnya optimal dalam mencapai pemerataan pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Sistem Zonasi; PPDB; Pemerataan Pendidikan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the implementation of the zoning system policy in the New Student Admissions (PPDB) for junior high schools in Surabaya. Using descriptive qualitative methods, we conducted interviews, observations, and a literature review to obtain data. The results indicate that the zoning system policy has had an impact on equalizing access to education and reducing public perceptions of the existence of favorite schools. However, the online registration system and the lack of public awareness regarding registration have left many people confused about the mechanism. Several other obstacles were also identified, such as a lack of facilities and infrastructure, limited school capacity, and the practice of manipulating domicile data. Therefore, the evaluation results indicate that the zoning system policy is not fully optimal in achieving comprehensive educational equality.

Keywords: Policy evaluation; Zoning system; PPDB; Educational equality

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan di Indonesia tidak hanya sebagai hak dasar bagi seluruh warga Indonesia, melainkan sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan menjadi salah satu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan melalui berbagai fase. Guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi (Kemendikbud, 2017). Upaya tersebut direalisasikan melalui program-program pendidikan mulai dari anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai memperhatikan sejak tahap awal, yaitu sistem yang diterapkan ketika anak akan menempuh pendidikan. Sistem zonasi telah diterapkan dalam pendidikan di Indonesia dalam hampir satu dekade ini, di mana model penerimaan peserta didik tidak melihat dari kemampuan akademik (Liu, 2015) dan suatu sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal siswa yang bersangkutan (Cahyani et al., 2020). Dengan tujuan agar semua anak Indonesia bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan kemampuan akademiknya. Karena sistem penerimaan atau PPDB sebelumnya menggunakan nilai dari UN (Ujian Nasional) sebagai tolak ukur agar peserta didik dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Sehingga muncul istilah “sekolah favorit” yang mana lebih dianggap berkualitas daripada sekolah lain. Hal ini menjadi salah satu latar belakang adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 tahun 2017 terkait kebijakan PPDB yang menggunakan sistem zonasi mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yaitu SD, SMP, dan SMA. Untuk tingkat SD dan SMP, kewenangannya diatur oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK kewenangannya diatur oleh pemerintah provinsi.

Dan seiring berjalannya waktu, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi telah mengalami banyak evaluasi karena perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat sehingga bertransformasi menjadi SPMB berbasis domisili. Kebijakan ini telah diterapkan untuk tahun ajaran 2025/2026. Perubahan yang paling mendasar di antara keduanya adalah tidak adanya sistem zonasi, persentase masing-masing jalur, perbedaan jalur prestasi dan tambahan persentase penerimaan jalur afirmasi (Shofwani et al., 2025). Meski zonasi bertujuan pemeratakan pendidikan, kenyataannya di lapangan masih ada masalah seperti manipulasi kartu keluarga atau ketimpangan jumlah sekolah di tiap wilayah. Inilah yang menjadi alasan mengapa kebijakan itu bertransformasi menjadi SPMB Berbasis Domisili. Perubahan ini bertujuan untuk lebih mengedepankan fleksibilitas dan keadilan distributif yang lebih presisi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai evaluasi kebijakan publik memerlukan landasan teoritis yang kuat guna memahami bagaimana suatu kebijakan dirumuskan,

diimplementasikan, serta dinilai keberhasilannya. Dalam penelitian ini, pendekatan teoritis yang digunakan merujuk pada pemikiran William N. Dunn terkait evaluasi kebijakan serta model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III.

2.1 Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan merupakan suatu proses analitis yang sistematis untuk menilai kinerja dan nilai suatu kebijakan publik berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan dalam konteks sosial.

Dunn mengemukakan sejumlah kriteria yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan efisiensi menilai hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Kecukupan mengacu pada kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan secara memadai, sementara pemerataan menekankan pada distribusi manfaat secara adil. Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan terhadap nilai serta tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka evaluasi dari Dunn digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan sistem zonasi dalam PPDB mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses pelaksanaannya. Edwards mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga, anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi dan prosedur operasional yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, model Edwards III digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diimplementasikan di lapangan, termasuk berbagai kendala yang muncul seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaan.

2.3 Sintesis Teoretis

Penggunaan kedua pendekatan tersebut memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi. Perspektif William N. Dunn berfokus pada penilaian terhadap hasil dan dampak kebijakan, sedangkan pendekatan George C. Edwards III menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan. Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang

komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zonasi, baik dari aspek hasil yang dicapai maupun proses pelaksanaannya di tingkat lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat dalam memahami dinamika sosial, persepsi, serta pengalaman berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut.

Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dengan model evaluasi *ex post*, yakni evaluasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan berjalan. Melalui model ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana sistem zonasi telah berjalan efektif serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pemerataan akses pendidikan di Kota Surabaya.

3.1 Kriteria Evaluasi Yang Digunakan

Penilaian terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penelitian ini didasarkan pada empat kriteria sebagai berikut:

- a. **Efektivitas:** Mengukur sejauh mana sistem zonasi PPDB mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pemerataan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan mutu antarsekolah.
- b. **Dampak:** Menilai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari penerapan sistem zonasi, baik yang dirasakan oleh peserta didik, pihak sekolah, maupun masyarakat secara lebih luas.
- c. **Relevansi:** Mengkaji kesesuaian kebijakan sistem zonasi dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi nyata dunia pendidikan di Kota Surabaya.
- d. **Keberlanjutan:** Menilai kemampuan kebijakan sistem zonasi untuk dipertahankan dalam jangka panjang dan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak, meliputi kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, peserta didik, serta pejabat Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang bersumber dari dokumen dan literatur tertulis, seperti peraturan perundang-undangan terkait sistem zonasi PPDB, laporan resmi Dinas Pendidikan, serta artikel ilmiah dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik kajian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Beberapa informan menyatakan bahwa setelah diterapkannya sistem zonasi, sekolah yang sebelumnya dianggap unggulan perlahan tidak lagi dipandang terlalu istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi mulai memberikan dampak terhadap pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah. Temuan tersebut sejalan dengan indikator efektivitas menurut William N. Dunn, yaitu sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pemerataan akses pendidikan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Salah satu informan menyampaikan bahwa jumlah siswa di beberapa sekolah meningkat cukup signifikan setelah sistem zonasi diterapkan, bahkan menyebabkan keterbatasan ruang kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan jumlah peserta didik belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, dari aspek kecukupan, kebijakan zonasi dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan daya tampung sekolah secara merata.

Dari aspek efisiensi, sebagian besar informan menilai bahwa proses PPDB zonasi sebenarnya sudah cukup mudah dan tidak berbelit. Sistem pendaftaran berbasis online dinilai membantu masyarakat dalam proses administrasi. Akan tetapi, bagi sebagian orang tua yang kurang memahami teknologi, sistem tersebut justru menjadi hambatan. Banyak orang tua mengalami kesulitan saat mengunggah dokumen maupun memahami alur pendaftaran secara digital. Selain itu, server pendaftaran juga sering mengalami gangguan atau lemot pada waktu-waktu tertentu ketika jumlah pengguna meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital masih perlu ditingkatkan agar dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada indikator pemerataan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses sekolah negeri akibat posisi domisili yang dianggap “nanggung” atau berada di wilayah perbatasan zona. Selain itu, pengurangan daya tampung sekolah di beberapa zona turut memengaruhi peluang siswa untuk diterima di sekolah tujuan. Kondisi tersebut menandakan bahwa pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Sementara itu, dari aspek responsivitas, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi cenderung beragam. Sebagian masyarakat merasa puas karena anak mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi. Namun, sebagian lainnya merasa kecewa karena selisih jarak rumah yang sangat tipis tetap menyebabkan anak mereka tidak diterima akibat keterbatasan kuota. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula berbagai keluhan dalam pelaksanaan PPDB zonasi, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran. Beberapa informan bahkan menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung terkait sistem zonasi. Kurangnya penyampaian

informasi ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur PPDB secara menyeluruh. Di sisi lain, beberapa informan juga mengungkapkan adanya praktik manipulasi data domisili oleh calon peserta didik demi memperoleh akses ke sekolah tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dinilai cukup transparan, masih terdapat celah penyimpangan dalam implementasinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP Kota Surabaya secara umum telah berdampak terhadap upaya pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini juga memengaruhi stigma ataupun pandangan masyarakat terkait adanya sekolah favorit karena distribusi peserta didik menjadi lebih merata antarsekolah. Dan sistem pendaftaran secara online dapat membantu para orang tua atau wali murid dalam proses administrasi PPDB. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Adanya keterbatasan terkait sarana dan prasarana sekolah dan meningkatnya jumlah peserta didik di beberapa sekolah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat atau orang tua dari siswa yang masih belum paham terkait sistem pendaftaran online dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ditemukan pula adanya praktik manipulasi data domisili yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan sistem zonasi.

Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn: kebijakan sistem zonasi telah menunjukkan pencapaian dalam aspek efektivitas dan pemerataan, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek kecukupan, responsivitas, dan ketepatan implementasi. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dan berkelanjutan secara optimal.

5.2 Saran

Perlu adanya peningkatan kualitas sosialisasi oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait mekanisme PPDB kepada masyarakat, terutama orang tua dan peserta didik, agar ke depannya dapat memahami prosedur pendaftaran dengan lebih baik. Serta perlu meningkatkan kualitas sistem pendaftaran secara online untuk meminimalisir adanya gangguan server. Kemudian juga perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap validitas data domisili dari calon peserta didik untuk mencegah terjadinya manipulasi data dalam proses PPDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches** (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). **Multivariate data analysis** (8th ed.). Cengage Learning. <https://www.cengage.com/c/multivariate-data-analysis-8e-hair/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). **Qualitative data analysis: A methods sourcebook** (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- OECD. (2021). **Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world**. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/75e40a16-en>
- Rahmawati, D. (2024). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia. **Jurnal Administrasi Publik Indonesia**, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.30656/japi.v15i2.1234>
- Sari, N., & Pratama, R. (2023). Analisis implementasi kebijakan zonasi pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. **Jurnal Kebijakan Pendidikan**, 12(1), 67–82. <https://doi.org/10.21009/jkp.v12i1.3456>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). **Research methods for business: A skill-building approach** (8th ed.). Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/Research+Methods+For+Business%3A+A+Skill+Building+Approach%2C+8th+Edition-p-9781119561247>
- Sugiyono. (2022). **Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D**. Alfabeta.
- Winarno, B. (2022). **Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus** (edisi terbaru). CAPS (Center for Academic Publishing Service).